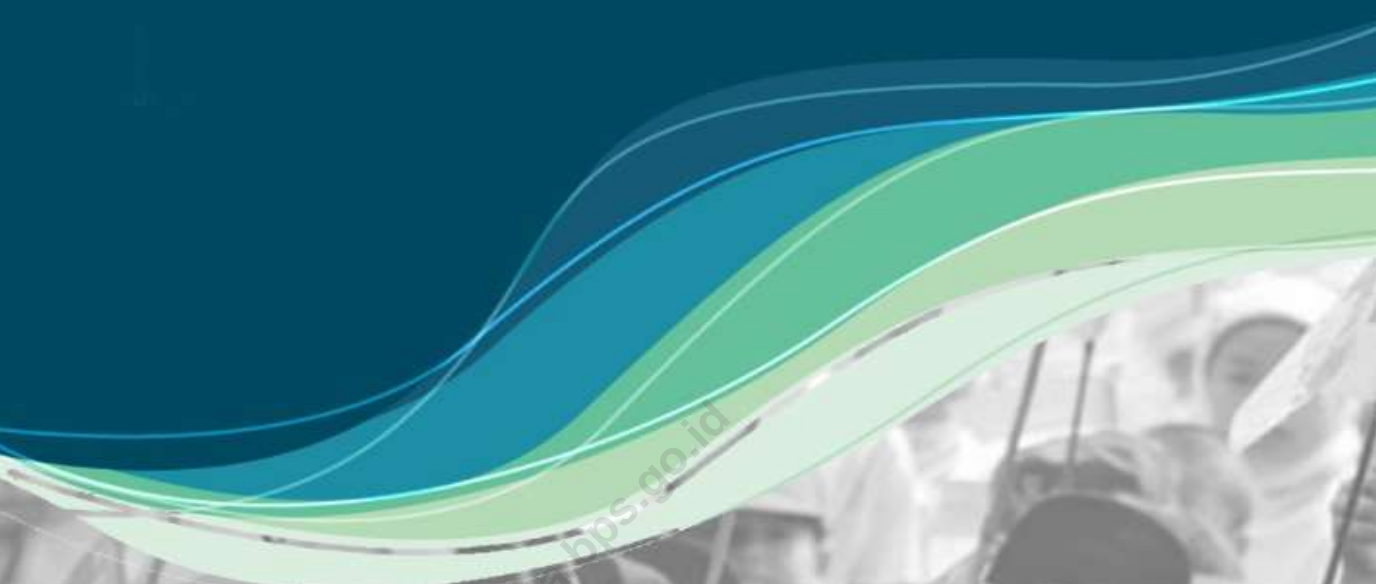


STATISTIK PENDIDIKAN KOTA MALANG *2019*



<https://malangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATITISTIK
KOTA MALANG**

STATISTIK PENDIDIKAN KOTA MALANG *2019*

<https://malang.kota.bps.go.id>



STATISTIK PENDIDIKAN KOTA MALANG 2019

No.Publikasi : 35730.2102
Katalog BPS : 4 3 0 1 0 0 2 . 3 5 7 3
Ukuran Buku : 17,6 × 25 cm
Jumlah Halaman : vii + 37 halaman

Naskah :
BPS Kota Malang

Penyunting :
BPS Kota Malang

Desain Sampul :
BPS Kota Malang

Diterbitkan :
© BPS KOTA MALANG

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Drs. Sunaryo, M.Si
Kepala BPS Kota Malang

Penyunting:

Satria Candra Wibawa, A.Md.

Penulis:

Rhyke Chrisdiana Novita, SE
Statistisi Ahli Pertama

Desain Sampul dan Pengolah Data:

Rhyke Chrisdiana Novita, SE
Statistisi Ahli Pertama

<https://malangkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Kota Malang merupakan publikasi rutin yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang. Publikasi ini menyajikan data terkait keadaan pendidikan di Kota Malang yang bersumber dari data BPS Kota Malang dan Dinas Pendidikan.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran hingga terbitnya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Kota Malang, Maret 2021

Kepala BPS Kota Malang



Drs. Sunaryo, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penulisan	4
BAB II METODOLOGI.....	5
2.1 Sumber Data.....	7
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	7
2.3 Metode Analisis	7
2.4 Konsep Definisi	8
BAB III KEADAAN PENDIDIKAN KOTA MALANG.....	15
3.1 Pendidikan Anak Pra Sekolah.....	18
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	19
3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)	21
3.4 Angka Partisipasi Murni (APM).....	22
3.5 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	24
3.6 Rata-Rata Lama Sekolah.....	26
3.7 Pendidikan yang Ditamatkan	27
3.8 Fasilitas Pendidikan	28
3.9 Pembiayaan Sektor Pendidikan.....	30
BAB IV KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Angka Partisipasi Anak pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Malang, Tahun 2017-2018.....	19
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Malang, Tahun 2019.....	21
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Malang, Tahun 2018.....	23
Tabel 3.4	Persentase Angka Melek Huruf Menurut Kota Malang Tahun 2019.....	25
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Malang, Tahun 2017-2018.....	27
Tabel 3.6	Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru Kota Malang, Tahun 2017-2018.....	28
Tabel 3.7	Rasio Sekolah-Murid, Guru-Murid dan Rasio Sekolah-Guru Pada Jenjang SD, SLTP dan SLTA di Kota Malang, Tahun 2017-2018... ..	29
Tabel 3.8	Rata-rata dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Setahun Aneka Barang dan Jasa di Kota Malang, Tahun 2019.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Umur 3–6 Tahun Menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah di Kota Malang, Tahun 2018.....	18
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Malang, Tahun 2014-2018.....	21
Gambar 3.3	Perbandingan Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kota Malang dan Indonesia, Tahun 2017-2018	24
Gambar 3.4	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Malang, Tahun 2013-2018.....	26
Gambar 3.5	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Bahan Bukan Makanan di Kota Malang, Tahun 2018	31

<https://malangkota.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Usaha ini bukan merupakan usaha perorangan atau hanya merupakan usaha pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Pendidikan merupakan suatu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang pendidikan harus merupakan prioritas utama yang perlu ditingkatkan kualitasnya karena pendidikan merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan kualitas SDM juga akan baik dan selanjutnya tingkat kesejahteraan akan lebih baik.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/RPJP), pembangunan sektor pendidikan diarahkan dan dititik beratkan pada mutu dan perluasan kesempatan belajar. Upaya peningkatan mutu pendidikan dimaksudkan untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan usaha perluasan kesempatan belajar dimaksudkan supaya penduduk usia sekolah dapat memperoleh kesempatan pendidikan.

1.2 Tujuan

Secara umum penyusunan publikasi Statistik Pendidikan Kota Malang Tahun 2019 ini untuk memberikan gambaran tentang pendidikan yang telah dan sedang dicapai oleh masyarakat di Kota Malang. Selanjutnya agar dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dalam rangka menyongsong program pemerintah di bidang pendidikan menuju *Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Program Wajib Belajar (Wajar)*.

1.3 Sistematika Penulisan

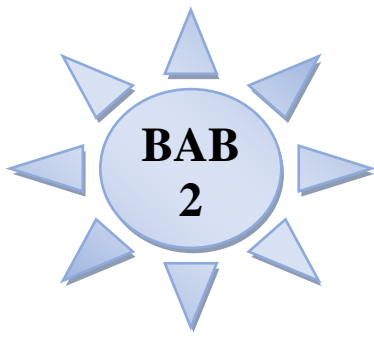
Sesuai dengan jenis data dan ruang lingkup data pendidikan yang tersedia, maka analisis sederhana dikelompokkan menurut urutan proses dan dampak program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Bab I menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya analisis ini dan tujuan yang diharapkan. Sedangkan Bab II memberikan penjelasan tentang metodologi dari pengumpulan data serta konsep yang dipergunakan. Setelah secara umum diketahui maksud dan tujuan publikasi ini, maka besaran angkanya dianalisis secara sederhana yang tertuang di dalam Bab III. Bab ini membahas tentang situasi pendidikan masyarakat di Kota Malang yang berkaitan dengan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Akhirnya Bab IV menyajikan kesimpulan dari pembahasan.



BAB II

METODOLOGI



METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Sumber data utama dari penulisan Indikator Pendidikan Kota Malang ini, adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS. Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas diantaranya adalah data pendidikan. Selain itu, beberapa data terkait dengan fasilitas pendidikan didapatkan dari Dinas Pendidikan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Sedangkan data fasilitas pendidikan yang bersumber dari Dinas Pendidikan dikutip dari Kota Malang Dalam Angka.

2.3 Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Statistik Pendidikan Kota Malang ini meliputi data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum tentang keadaan pendidikan penduduk di Kota Malang pada tahun 2018. Analisis bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

2.4 Konsep Definisi

Dalam berbagai pembahasan, seringkali kita memandang sesuatu dengan cara yang berbeda, untuk itu di dalam publikasi ini guna menghindari persepsi dan anggapan yang berbeda telah disepakati konsep dan definisi yang digunakan antara lain :

1. Seseorang dikatakan *bersekolah* apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A/B/C) baik yang di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian/Lembaga lain.
2. Pendidikan anak Prasekolah ialah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

- a. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Paket A dan Paket B.
- b. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas), serta Paket C.

c. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:

1. *Program gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).
2. *Program non-gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

Partisipasi sekolah

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu :

Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A/B/C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud), Kementerian Agama (kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A/B/C) tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki:

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong).

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat.

Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen.

Program D.I/II adalah program D.I/D.II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal.

Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda.

Program D.IV/SI adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi.

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki

Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/sederajat.

SD adalah tamat Sekolah Dasar atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar.

Paket A adalah tamat mengikuti ujian Paket A yang diselenggarakan oleh Kemendiknas.

SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama.

Paket B adalah tamat mengikuti ujian Paket B yang diselenggarakan oleh Kemendiknas.

SMA/ sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat.

Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas.

SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA.

Paket C adalah tamat mengikuti ujian Paket C yang diselenggarakan oleh Kemendiknas.

Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma.

Diploma III/Sarjana Muda, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi.

Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-

24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

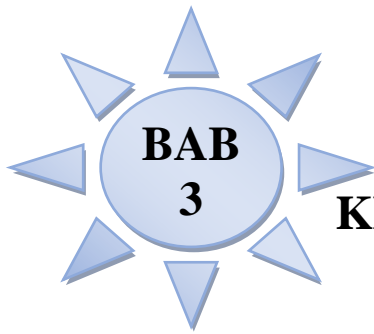
<https://malangkota.bps.go.id>



BAB III

KEADAAN PENDIDIKAN

KOTA MALANG



KEADAAN PENDIDIKAN KOTA MALANG

Sumber daya manusia berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusia demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, baik formal maupun non formal.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan non formal dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup (*life skill*) kepada masyarakat. Pendidikan non formal juga dapat membekali sikap kemandirian yang mendorong tercapainya kesempatan untuk berwirausaha, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya pada tahun 1994 pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia juga mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagai upaya lain dalam meningkatkan pendidikan.

Dalam program PUS ini, pelayanan pendidikan harus dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Dimana terdapat 6 (enam) target

PUS yang akan dicapai hingga tahun 2015 yang meliputi pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan dan berkelanjutan, pendidikan berkeadilan gender dan peningkatan mutu pendidikan.

3.1 Pendidikan Anak Pra Sekolah

Pendidikan anak usia dini bertujuan agar semua anak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh kembang secara optimal. Pra Sekolah juga merupakan modal pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Secara lebih spesifik program ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui : (1) PAUD non formal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan (2) PAUD formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhotul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Melalui Pra Sekolah diberikan pendidikan, perawatan dan pengembangan anak secara

Gambar 3.1
Persentase Penduduk Umur 3-6 Tahun
Menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah
Di Kota Malang Tahun 2019



Sumber: BPS Kota Malang

terpadu, sehingga diharapkan masa keemasan (*the golden age*) tersebut dapat dikembangkan secara optimal.

Pada 2019, sekitar 72,84 persen anak umur 3-6 tahun di Kota Malang yang memperoleh akses terhadap pendidikan Pra Sekolah, dengan rincian 5,35 persen telah mengikuti program Pra Sekolah dan 67,49 persen sedang mengikuti program Pra Sekolah. Angka Pra Sekolah pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 8,32 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, anak yang memperoleh akses Pra Sekolah (Pernah & Sedang) di Malang sebesar 64,52 persen.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Berumur 3-6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Kota Malang, tahun 2018-2019

Tahun	Partisipasi Sekolah		
	Pernah	Sedang	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	11,05	53,47	35,8
2019	5,35	67,49	27,16

Sumber : BPS Kota Malang

3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan untuk melihat dan mengevaluasi program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7-12 sudah di atas 95 persen dan APS umur 13-15 tahun sudah di atas 70 persen.

Pada tahun 2019, APS penduduk 7–12 tahun mencapai 100 persen, ini berarti tidak terdapat penduduk 7-12 tahun yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi. Dari 100 persen penduduk umur 7-12 tahun yang bersekolah ada yang masih sekolah di SD dan yang sudah duduk di bangku SMP. Sedangkan APS penduduk umur 13-15 tahun sebesar 95,59 persen artinya 4,41 persennya masih belum sekolah atau tidak sekolah lagi. 95,59 persen penduduk berumur



13-15 tahun tersebut masih aktif bersekolah pada tingkat SD, SLTP atau sudah di bangku SLTA.

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian APS untuk usia 7-12 tahun (100 persen) sudah memenuhi target wajib belajar yang mencapai 95 persen, demikian juga target APS usia 13-15 tahun sudah terlampaui. Sehingga dapat dikatakan upaya pemerintah dalam mencapai program wajib belajar pada tahun 2019 sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Jika dilihat dari sudut gender tidak terdapat perbedaan yang signifikan partisipasi sekolah antara laki-laki dengan perempuan. Dimana biasanya penduduk laki-laki mempunyai kesempatan lebih besar untuk bersekolah dibanding penduduk perempuan. Hasil Susenas mengindikasikan bahwa APS perempuan lebih tinggi dari APS laki-laki di semua jenjang pendidikan (SD dan SLTP). Sedangkan Pendidikan jenjang SLTA mengindikasikan bahwa APS laki-laki lebih tinggi dari APS perempuan.

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Sekolah
(APS) di Kota Malang Tahun
2019

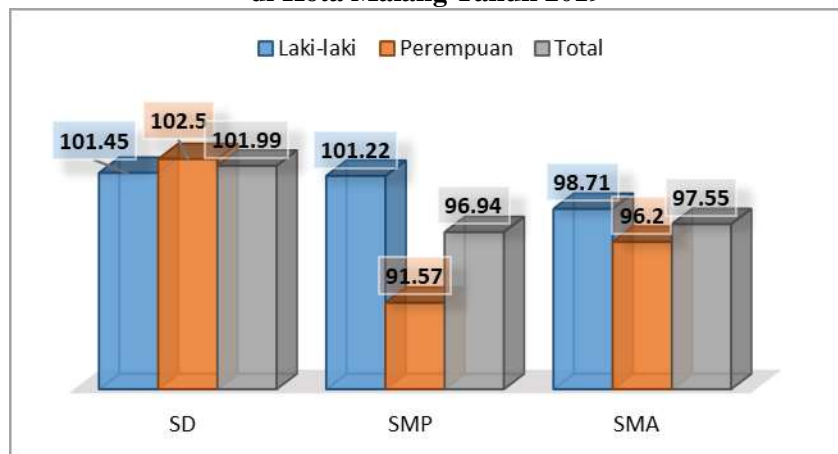
Karakteristik	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	100,00	93,83	80,81
Perempuan	100,00	97,79	87,40
Kota Malang	100,00	95,59	83,87

Sumber : BPS Kota Malang

3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK), indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar sebesar 101,45 persen untuk laki-laki dan untuk perempuan sebesar 102,50. Hal ini menunjukkan bahwa semua penduduk berumur 7-12 tahun sedang menempuh pendidikan di Sekolah dasar

Gambar 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kota Malang Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Malang

Sama halnya dengan APK SD, APK untuk jenjang sekolah SMP nilainya mendekati angka seratus persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semua dari anak berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawah/di atasnya, sedangkan nilai APK pada jenjang SMA mendekati angka 100 persen untuk anak laki-laki yaitu sebesar 98,71 persen dan 96,20 persen untuk anak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah murid laki-laki yang sedang sekolah di jenjang SMA/Sederajat hampir sama dengan penduduk perempuan berumur 16-18 tahun. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM.

3.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil dari nilai APKnya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

APK pada jenjang SD/ sederajat pada tahun 2019 sebesar 101,99 persen sedang APM SD/ sederajat hanya sebesar 96,87 persen berarti bahwa murid SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun sebanyak 101,99 persen, sedangkan selisih antara APK dan APM sebesar 5,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/ sederajat 5,12 persennya berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Pada jenjang SMP/ sederajat, APK nya sebesar 101,22 persen sedangkan APM nya sebesar 85,30 persen yang berarti bahwa hanya 85,30 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai murid

SMP/ sederajat dan sisanya bisa terserap dijenjang pendidikan SD atau SMU/ sederajat. Selisih antara APK dan APM SMP/ sederajat sebesar 15,92 persen, hal ini menunjukkan bahwa diantara murid SMP/ sederajat 15,92 persennya berumur kurang dari 13 tahun atau lebih dari 15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU/ sederajat, nilai APKnya juga lebih besar daripada APMnya.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Malang, Tahun 2019

Karakteristik	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
-1	-2	-3	-4
Jenis Kelamin			
Laki-laki	95,92	85,30	64,06
Perempuan	97,80	85,29	66,06
Kota Malang	96,87	85,30	64,99

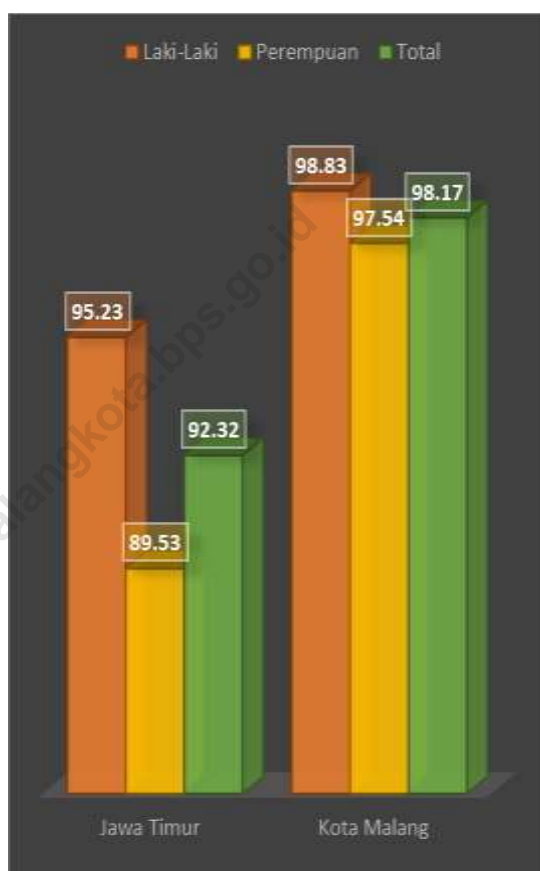
Sumber : BPS Kota Malang

Ditinjau dari sudut gender, terdapat perbedaan APM antara laki-laki dan perempuan. Pada jenjang SD nilai APM laki-laki (95,92 persen) lebih kecil dari APM perempuan (97,80 persen), sedangkan pada jenjang SMP, APM laki-laki lebih kecil 0,01 persen jika dibandingkan dengan APM perempuan. Pada jenjang SMA nilai APM perempuan lebih besar dari APM laki-laki, hal ini disebabkan banyaknya penduduk perempuan usia 16-18 yang bersekolah pada jenjang SMA menyebabkan APM perempuan lebih besar daripada APM laki-laki.

3.5 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan

Gambar 3.3
Perbandingan Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kota Malang dan Jawa Timur, Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Malang

Pada tahun 2019, sekitar 98,17 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kota Malang telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 1,83 persen penduduk yang masih belum dapat membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf.

AMH penduduk usia 15 tahun ke atas lebih tinggi 2.57 persen dibanding dengan AMH Jawa Timur. Dengan demikian upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan sudah bisa dikatakan berhasil, diharapkan kedepan penduduk Kota Malang bisa lebih maju lagi dan tidak tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 3.4
Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 tahun Keatas Menurut Kota Malang, Tahun 2019

Karakteristik	Kemampuan Membaca dan Menulis		
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Melek Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,19	14,71	98,83
Perempuan	96,96	14,65	97,54
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	95,98	50,46	83,63
40 Persen Tengah	99,30	67,03	13,20
20 Persen Teratas	99,73	67,12	3,17
Kota Malang	98,12	60,75	100

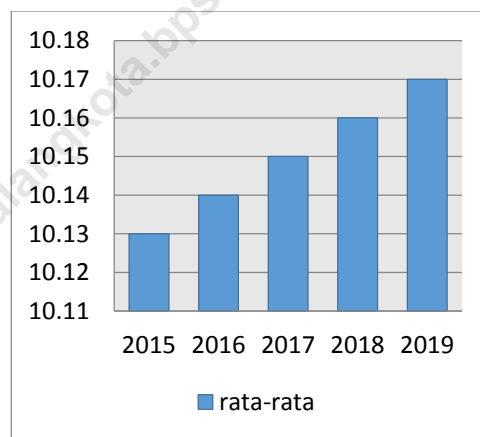
Sumber : BPS Kota Malang

3.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 10.17 persen. Dengan kata lain penduduk di Kota Malang baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1-2 SMA. Angka ini sudah di atas target program Wajar yang di canangkan pemerintah.

Gambar 3.4
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Malang, Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Malang

Rata-rata lama sekolah di Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahun. Selama kurun waktu 2015-2019 rata-rata lama sekolah adalah masing-masing sebesar 10,13, 10,14, 10,15, 10,16 dan 10,17. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi dan kesadaran masyarakat atau fasilitas pendidikan yang semakin berkembang. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen. Berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun, Kota Malang adalah Kota yang sudah memenuhi target tersebut.

3.7 Pendidikan yang Ditamatkan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Tabel 3.5
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang,
Tahun 2018-2019

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tahun	
	2018	2019
1	2	3
Tdk Tamat SD	14.76	16.96
SD	18.99	17.65
SLTP	17.85	18.89
SLTA	33.45	30.17
AKADEMI/UNIVERSITAS	14.94	16.33
TOTAL	100	100

Sumber : BPS Kota Malang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari semakin tingginya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi. Tabel 3.3 menyajikan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Dari tabel tersebut terlihat persentase penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 penduduk yang telah menamatkan pendidikannya minimal SLTP sebesar 17,85 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 18,89 persen.

Secara keseluruhan proporsi penduduk yang belum memiliki pendidikan dasar masih rendah. Proporsi penduduk yang tidak tamat SD nilainya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 14,76 persen menjadi 16,69 persen.

3.8 Fasilitas Pendidikan

Salah satu indikator yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat jumlah sarana pendidikan yang tersedia beserta rasio tenaga pendidik dengan murid.

Tabel 3.6
Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Kota Malang
Tahun Ajaran 2018-2019

SEKOLAH	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	274	282	108.799	76.221	3.370	4.048
SLTP	101	107	35.203	34.854	2.254	2.236
SLTA	50	50	20.095	20.512	1.251	1.207

Sumber : Dinas Pendidikan Malang

Jumlah sarana pendidikan di Kota Malang pada tahun ajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel 3.6. Jumlah sekolah SD sebanyak 282 sekolah, SLTP sebanyak 107 sekolah dan jumlah sekolah SLTA sebanyak 50 sekolah. Sedangkan jumlah murid yang tercatat di sekolah SD sampai dengan SLTA berturut-turut sebesar 76.221, 34.854 dan 20.512 orang, dengan tenaga pengajar masing-masing seperti yang tercantum pada tabel 3.6.

Jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah murid tentu saja tidak cukup mempunyai arti jika hanya berupa penjumlahan. Pada tabel berikut akan ditampilkan rasio sekolah-murid maupun rasio murid guru keadaan tahun ajaran 2017/2018.

Tabel 3.7
Rasio Sekolah-Murid, Guru-Murid dan Rasio Sekolah-Guru pada
Jenjang SD, SLTP dan SLTA di Kota Malang
Tahun Ajaran 2018-2019

SEKOLA H	Rasio Sekolah - Guru		Rasio Sekolah - Murid		Rasio Guru - Murid	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	1 : 12	1:14	1 : 397	1:270	1 : 32	1:18
SLTP	1 : 22	1:20	1 : 850	1:325	1 : 38	1:15
SLTA	1 : 28	1:24	1 : 449	1:410	1 : 14	1:16

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang



Dari tabel 3.7 terlihat bahwa pada tahun 2019, setiap sekolah terdapat 14 guru pada jenjang sekolah SD dan sebanyak 20 guru pada jenjang sekolah SLTP serta sebanyak 24 guru pada jenjang SLTA. Jumlah rasio sekolah-murid untuk jenjang SD mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 setiap sekolah dapat menampung sebanyak 397 murid menjadi 270 murid di tahun 2019, pada jenjang SLTP juga mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu dari 850 murid turun menjadi 325 murid di tahun 2019 sedangkan SLTA angkanya mengalami penurunan dimana tahun 2018 sebanyak 449 murid turun menjadi 410 murid.

Sementara itu rasio guru-murid menggambarkan beban guru mengawasi murid dalam kegiatan belajar mengajar. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 setiap guru pada jenjang SD mempunyai beban terhadap 18 murid, pada jenjang SLTP, 1 guru berbanding 15 murid. Begitu juga pada jenjang SLTA 1 guru mengajar sebanyak 26 murid.

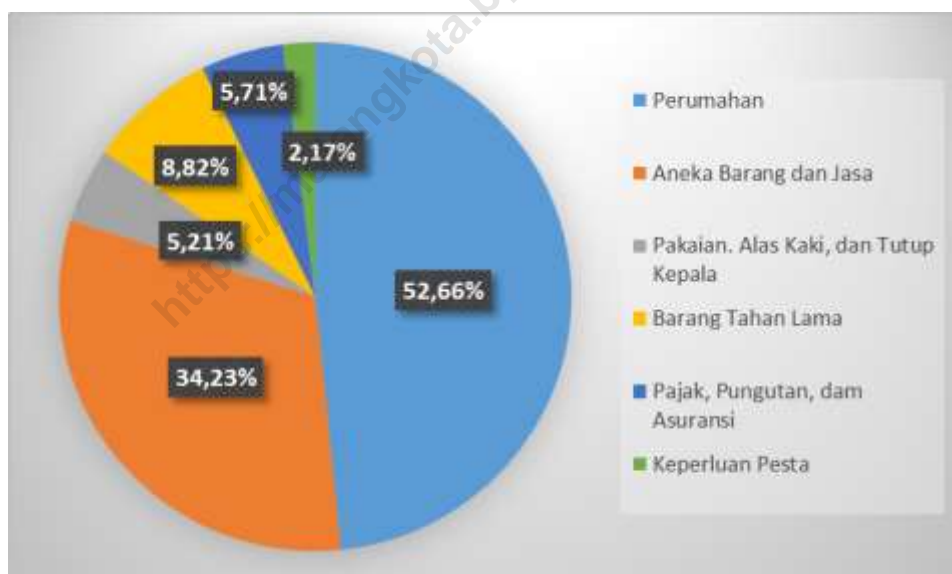
3.9 Pembiayaan Sektor Pendidikan

Pembiayaan sektor pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menentukan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Kota Malang dapat tercapai jika ditunjang dengan anggaran yang cukup. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih memprioritaskan kepada sektor pendidikan, yang secara aturan harusnya dialokasikan sebesar 20 persen. Selain anggaran pendidikan dari pemerintah, anggaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk keperluan pendidikan anaknya juga dapat mempengaruhi kualitas

pendidikan. Tersedianya alat tulis, buku-buku pelajar serta peralatan sekolah lainnya dapat memotivasi siswa untuk terus belajar.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk setahun selama tahun 2019 di Kota Malang kebanyakan digunakan untuk bahan bukan makanan (61,71 persen), sedangkan pengeluaran untuk bahan makanan hanya sebesar 38,29 persen. Dimana pengeluaran bahan bukan makanan terbesar digunakan untuk keperluan perumahan (52,66 persen), sedangkan pengeluaran sektor keperluan pesta merupakan pembiayaan yang paling kecil sebesar 2,17 persen.

Gambar 3.5
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Setahun Bahan Bukan Makanan di Kota Malang, Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Malang

Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita setahun untuk aneka barang dan jasa di Kota Malang 34,23 persen, dengan rincian (20,61 persen) digunakan untuk barang-barang keperluan pribadi, (15,51 persen) digunakan untuk biaya kesehatan, (40,90 persen) digunakan untuk

biaya pendidikan, (11,99 persen) digunakan untuk transportasi, dan (10,99 persen) digunakan untuk akomodasi. Pengeluaran per kapita setahun untuk aneka barang dan jasa yang paling banyak dikeluarkan adalah untuk biaya pendidikan, sedangkan yang paling kecil adalah untuk transportasi.

Tabel 3.8
Rata-rata dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Setahun
Aneka Barang dan Jasa di Kota Malang, Tahun 2019

Aneka Barang Jasa	Rata-rata (Rupiah)	Presentase (%)
Barang-barang Keperluan Pribadi	760.264,65	20.61
Biaya Kesehatan	571.936,98	15.51
Biaya Pendidikan	1.508.988,82	40.90
Transportasi	442.162,78	11.99
Akomodasi	405.241,50	10.99
Total	3.688.594,73	100

sumber : BPS Kota Malang



BAB IV

KESIMPULAN



BAB 4 KESIMPULAN

Dari berbagai uraian tentang Indikator Pendidikan Kota Malang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendidikan anak Pra Sekolah dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan masa keemasan anak (*the golden age*). Partisipasi PAUD di Kota Malang mencapai 72,84 persen, artinya sudah banyak anak usia 3-6 tahun yang telah diperkenalkan pada pendidikan.
2. Program wajib belajar 9 tahun di Kota Malang sudah tercapai, dimana nilai APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 persen sudah di atas target (95 persen). Jika dilihat dari nilai rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai 10,17 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa penduduk Kota Malang baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1-2 SMA.
3. Bila dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, nampak masih terdapat 1,83 persen penduduk yang masih buta huruf. Artinya masih adanya penduduk di Kota Malang yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin.
4. Ditinjau dari ijazah tertinggi yang dimiliki, lebih dari separuh penduduk Malang berpendidikan SLTP ke atas. Pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 34,61 persen penduduk

10 tahun ke atas di Kota Malang berpendidikan SD ke bawah, diantaranya yang tidak tamat SD 16,96 persen dan tamat SD 17,65 persen. Sementara itu penduduk yang berhasil menamatkan pada jenjang SLTP ke atas sebanyak 18,89 persen.

5. Dilihat dari sudut pandang gender, hampir sudah tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan relatif hampir seimbang dengan laki-laki
6. Dilihat dari pembiayaan sektor pendidikan tahun 2019 sebesar 40,90 persen yang merupakan pembiayaan tertinggi dibanding dengan sektor yang lain di Aneka Barang dan Jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pendidikan menjadi perhatian tersendiri bagi rumah tangga dan menjadi prioritas demi kualitas pendidikan yang lebih baik.

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG

JL. JANTI BARAT NO. 47 MALANG 65148

TELP (0341) 801164 FAKS (0341) 805871

EMAIL: bps3573@bps.go.id

Website : malangkota.bps.go.id